

Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Final (PPH-Final) di sektor UMKM pada KPP Ngawi

**Sulastri Andayani, Subagyo, Wibowo Andoko
D3 Akuntansi, Politeknik Cahaya Surya Kediri**

ABSTRAK

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan terbesarnya yaitu dari perpajakan terutama di dalam sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yaitu tentang pengenaan pajak terhadap pelaku UMKM sebesar 1% dari peredaran bruto atau omset tidak melebihi 4,8 miliar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan perkembangan penerimaan pajak penghasilan final atas sektor UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Ngawi. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan dokumentasi dan studi kepustakaan. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa (1) Pajak Penghasilan Final pada Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Ngawi tahun 2015 mengalami perkembangan yang cukup baik meski belum mencapai target yang telah ditentukan. (2) Untuk 2016 perkembangan pajak penghasilan final pada penerimaan pajak KPP Ngawi juga mengalami perkembangan yang bagus atau naik dan bisa dikatakan cukup baik meskipun juga belum bisa mencapai target yang ditentukan. (3) Efektivitas pada Penerimaan Pajak Penghasilan Final atas sektor UMKM pada KPP Pratama Ngawi pada tahun 2015 cukup efektif meski belum mencapai kategori baik atau sangat efektif, sedangkan pada tahun 2016 efektivitas yang terjadi bisa dikatakan tinggi atau cukup efektif dibandingkan dengan tahun 2015.

Kata kunci :Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Final di Sektor UMKM pada KPP Pratama Ngawi.

ABSTRACT

The government's effort in increasing its largest income is from taxation, especially in the sector of Micro Small Medium Enterprises (MSMEs). Government Regulation (PP) No. 46 of 2013 is about taxation on the perpetrators of MSME of 1% of gross turnover or turnover not exceeding 4.8 billion. The purpose of this study is to determine the effectiveness and development of final income tax revenue on the sector of SMEs in the Office of Primary Tax Service in Ngawi City. Methods of data collection in this study is by documentation and literature study. While the data analysis method used is descriptive analysis. The results of the discussion show that (1) the Final Income Tax on Tax Receipts in the Tax Office Primary of Ngawi City in 2015 has a good development even though it has not reached the target that has been determined. (2) For 2016, the development of final income tax on tax receipts KPP Ngawi also experienced a good development or rise and can be quite good, although also not yet able to reach the target specified. (3) The effectiveness of Final Income Tax on MSME sector in KPP Pratama Ngawi in 2015 is effective even though it has not reached the good or very effective category, whereas in 2016 the effectiveness that happened can be said is high or quite effective compared to the year 2015.

Key Word : Effectiveness of Final Income Tax Receipts in MSMEs Sector at KPP PratamaNgawi.

Indonesia	▼		▼
-----------	---	--	---

A. Pendahuluan

LatarBelakangMasalah

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya keperluan negara selain itu juga untuk mencapai kesejahteraan umum. Harusnya semua pajak dibayar sesuai dengan harta yang dimiliki. Karena semua yang wajib pajak berikan akan kembali kepada mereka yang tidak lain adalah wajib pajak itu sendiri, melalui berbagai pembenahan di dalam masyarakat.

Menurut Siahaan (2010:8), menurut lembaga pemungutan pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Penerimaan pajak diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun, karena pendapatan pajak itulah dapat dilakukan pembangunan yang lebih maju, infrastruktur yang memadai, dan akses-akses jalan yang menjadi lebih baik. Kalau dahulu pemerintah masih berjaya akan sumber daya alam seperti salah satunya penerimaan dari sektor minyak dan migas, sekarang semua menipis dan mengharuskan pemerintah untuk mencari sumber pendapatan yang ada untuk membangun pemerintah yang makmur, dan kini pemerintah mengandalkan pendapatan terbesarnya dari pajak.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 mengenai pajak bagi UMKM masih terbilang baru, karena baru dikeluarkan pada 1 Juli 2013 maka UMKM harusnya memahami secara mendalam karena ini sangat penting. Manfaat yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 ini sangat berpengaruh pada UMKM, kalau biasanya pendapatan mereka berkurang karena membayar pajak terutang sesuai dengan aturan perpajakan, namun sekarang untuk pelaku UMKM memiliki tarif sebesar 1% sesuai dengan tarif pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. Sehingga kemungkinan

pajak terutang yang harus dibayarkan UMKM semakin kecil dan berdampak pada penerimaan pajak dari sektor UMKM.

Penerimaan pajak penghasilan (PPh) merupakan salah penerimaan diluar migas. Penerimaan pajak penghasilan ini diharapkan dapat terus meningkat dan terus tumbuh seiring dengan pertumbuhan dunia usaha nasional, oleh karena itu pemerintah mulai giat, semangat dan gencar untuk melaksanakana dan melakukan trobosan yaitu dengan menerapkan sistempengenaan PPh yang bersifat final (PPh-Final). Kebijakan pemerintah ini diharapkan mampu meningkatkan masyarakat patuh dan sadar akan pajak, serta diharapkan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dan tanggungannya sebagai wajib pajak, sehingga penerimaan pajak dapat meningkat dan terus bertambah.

Penelitian ini dilakukan di kota Ngawi, sebab kota Ngawi merupakan kota yang terkenal dengan industri kayu olahan dan batik. Banyaknya hutan dan luasnya tanah yang ditanami berbagai jenis pohon yang berkualitas dan bernilai tinggi seperti pohon jati, pohon eboni, pohon mahoni yang bisa dibuat menjadi barang-barang cantik dan juga bisa digunakan sebagai perabotan rumah tangga atau mebel. Bahan baku kayu yang sudah tidak dipakai atau tidak digunakan disulap menjadi barang-barang antik dan berkualitas, dari ujung ranting sampai akar bisa diolah menjadi perabotan yang memiliki harga jual dari harga rendah sampai bernilai tinggi, mulai dari asbak, meja dan kursi, lemari, vas bunga, replika pohon natal, pigura dan masih banyak lagi. Harga per item pun bervariasi tinggal melihat tingkat kerumitan. Ini yang menjadikan kota Ngawi memiliki icon tersendiri. Dari banyaknya kerajinan yang dibuat dan diolah oleh pelaku usaha kecil menengah tersebut tentunya pendapatan yang diperoleh dan diterima cukup besar dan tentu akan mempengaruhi pendapatan kota Ngawi terutama penghasilan di sektor UMKM dan juga berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak.

Berdasarkan gambaran umum dan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Final (PPh-Final) di sektor UMKM pada KPP Ngawi.**

Batasan Masalah

Agar penulis tidak mengalami kesulitan dalam menyampaikan isi dari Tugas Akhir ini dan agar tidak menyimpang dari materi yang telah ada serta rumusan dan tujuan maka penulis memberikan dan menetapkan batasan-batasan tersebut yaitu :

1. Penulis hanya membahas yang berkaitan dengan materi yang ada yaitu “Efektivitas penerimaan pajak penghasilan final di sektor UMKM pada KPP Ngawi, adapun tahun yang diambil untuk diteliti adalah tahun 2015 dan 2016.
2. Membahas perkembangan pajak penghasilan final di sektor UMKM tahun 2015 dan 2016.

UMKM yang dijadikan objek penelitian ini adalah sektor industri olahan kayu.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah

1. Bagaimana perkembangan pajak penghasilan final di sektor UMKM pada KPP Kota Ngawi tahun 2015 dan 2016 ?
2. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak penghasilan final di sektor UMKM pada KPP Kota Ngawi tahun 2015 dan 2016 ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan peneliti yaitu :

1. Untuk mengetahui perkembangan pajak penghasilan final di sektor UMKM Kota Ngawi (studi kasus pada KPP Pratama Ngawi)
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak di sektor UMKM Kota Ngawi (studi kasus pada KPP Pratama Ngawi).

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan oleh kalangan yang membutuhkan informasi yang berkaitan tentang “Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Final di sektor UMKM pada KPP Kota Ngawi” dan diharapkan hasil penelitian ini menambah dan memperluas pengetahuan serta dapat menambah masukan bagi pengembangan ilmu.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat khususnya yang berkaitan dengan Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Final di sektor UMKM Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kota Ngawi.

b. Bagi instansi

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada instansi maupun pemerintah bagaimana Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Final di Sektor UMKM.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu akuntansi khususnya pada konsentrasi perpajakan serta sebagai referensi, dan bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut, serta menambah pengetahuan dan wawasan untuk penulis yang melakukan penelitian sejenis.

B. Landasan Teori

1. UMKM

- a. Menurut Ratna (2013:47) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasar undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi semua kemakmuran rakyatnya.

Menurut Andriani dan Kurnia (2010:22) merumuskan bahwa, Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut perturan-peraturandengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah”.

Menurut Waluyo (2011:4) “pajak adalah iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh wajib pembayarannya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum”.

Pajak menurut Siti Resmi (2013:2) adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan dukungan tertentu tetapi bukan hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tanpa adanya timbal balik secara langsung yang dapat dirasakan oleh rakyat dan bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.

3. Pajak Penghasilan final

a. Pengertian Pajak Penghasilan Final

Pajak Penghasilan Final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaannya pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan adapun Undang-undang No.36 tahun 2008 mulai berlaku 1 Januari 2009.

4. Pada Peraturan Pemerintah (PP) No.46 Tahun 2013

Pada pasal 1 ayat (1) dalam peraturan pemerintah ini, yang diartikan dengan Undang-undang (UU) pajak penghasilan UU No.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.36 tahun 2008.

Pada pasal 2 ayat (1) atas penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai pajak yang bersifat final. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah peredaran bruto (omset) setiap bulan (pasal 4 ayat (1)) Pajak penghasilan terutang dihitung berdasar tarif 1% dikalikan dengan jumlah peredaran bruto (omset) setiap bulan (pasal 4 ayat 2). Peredaran bruto yang dimaksud adalah dari usaha dalam 1(satu) tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan (pasal 3 ayat (2)). Apabila peredaran bruto (omset) kumulatif wajib pajak pada satu bulan telah melebihi dengan jumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak, wajib pajak tetap dikenai tarif pajak penghasilan sebesar 1% sampai dengan akhir tahun pajak yang bersangkutan (pasal 3 ayat (3)). Dan apabila peredaran bruto yang ada pada wajib pajak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada satu tahun pajak, atas penghasilan yang diterima wajib pajak pada tahun pajak berikutnya dikenakan tarif pajak penghasilan berdasar ketentuan Undang-Undang pajak penghasilan (pasal 4 ayat (3)). Atas penghasilan selain dari usaha yang diterima atau

diperoleh wajib pajak, dikenai pajak penghasilan berdasar Undang-undang pajak penghasilan (pasal 6).

5. Efektivitas Penerimaan Pajak

a. Pengertian efektivitas

Menurut Mardiasmo (2010 : 134) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan. Disebut efektif apabila tercapai tujuan sasaran seperti yang telah ditentukan.

Menurut Ulum (2009:28) efektivitas memiliki pengertian ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan. Sedangkan dalam perpajakan memiliki pengertian jumlah penerimaan yang sebenarnya dibandingkan dengan anggaran penerimaan yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Efektivitas menggambarkan kemampuan Direktorat Jenderal Pajak dalam merealisasikan anggaran penerimaan pajak yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasar potensi nyata. Kemampuan Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai 100% apabila rasio efektivitasnya semakin tinggi, menggambarkan kemampuan yang semakin baik (Hakim, 2004:135). Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan Pajak Penghasilan Badan Usaha, maka yang dimaksudkan yaitu seberapa besar realisasi penerimaan pajak penghasilan dapat mencapai target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu.

Ukuran Efektivitas

Dalam mengukur efektivitas bukanlah suatu hal yang sederhana, karena karena efektivitas dapat dilakukan dan dikaji dari berbagai sudut pandang dan juga tergantung pada siapa yang menilai. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Jika usaha atau hasil yang dilakukan atau dikerjakan tidak tepat, sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai maka hal tersebut dikatakan tidak efektif.

Kerangka Berpikir

Penerimaan pajak selama ini sangat membantu dalam memenuhi anggaran belanja negara terutama dalam menunjang kemakmuran dan membantu kesejahteraan masyarakat, Pendapatan dari sektor UMKM yang diperoleh dari para pelaku usaha mikro

kecil dan menengah (UMKM) diharapkan dapat membantu memperbaiki pendapatan pajak di Indonesia.

Perkembangan penerimaan pajak penghasilan final atas sektor UMKM pada KPP Ngawi juga menjadi salah satu pendapatan yang ada dan harus diperhatikan pengelolaannya, karena pajak penghasilan atas sektor UMKM di kota Ngawi cukup banyak membantu pendapatan penerimaan pajak di KPP Ngawi. Dengan demikian efektivitas penerimaannya juga harus maksimal dan baik supaya antara perkembangan penerimaan pajak penghasilan dengan efektivitas penerimaan bisa seimbang. Pajak penghasilan 1% dimulai sejak Juli 2013 dan diharapkan dengan adanya peraturan pemerintah itu pendapatan atas pajak bisa meningkat, termasuk pajak penghasilan pada pelaku UMKM

C. Metode Penelitian

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk judul ini terletak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Ngawi, Jl. Ahmad Yani No.2 Klitik, Geneng, Ngawi Jawa timur.

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif, mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan Perkembangan dan Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Final di Sektor UMKM pada KPP Pratama Kota Ngawi.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Kuantitatif

Menurut Sunyoto (2011:22) Data Kuantitatif merupakan data yang berupa angka atau bilangan yang absolut dapat dikumpulkan dan dibaca relatif lebih mudah. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah data yang diterima dari KPP yaitu data mengenai target dan realisasi atas penerimaan pajak pada sektor UMKM pada tahun 2015 dan 2016.

2. Kualitatif

Merupakan data yang berbentuk kalimat atau gambar. Pada data kualitatif, penulis menggunakan beberapa data, adalah Data tentang gambaran umum Kantor Pelayanan

Pajak Kota Ngawi, visi misi Kantor Pelayanan Pajak Kota Ngawi, struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi kepengurusan KPP Pratama Ngawi

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Indiantoro (1999:47) Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dengan melalui media perantara(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dalam penelitian ini adalah Laporan Penerimaan Pajak di Sektor UMKM pada KPP Kota Ngawi.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Dokumentasi menurut Sugiyono (2013:224) merupakan teknik pengumpulan data dengan melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari lembaga atau instansi. Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang lain.
2. Studi kepustakaan menurut Nazir (1998:111) dimana studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan topik atau masalah yang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik yang sehubungan dengan materi dan masalah yang dibahas oleh peneliti.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Analisis Deskriptif

Menurut Nasir (2003:53) Analisis Deskriptif digunakan untuk menggambarkan Perkembangan dan Efektivitas Penerimaan Pajak di sektor UMKM pada KPP Pratama Ngawi

2. Perhitungan efektivitas

(sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri, 2016)

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Ngawi KPP Pratama Ngawi merupakan Kantor Pelayanan Pajak Kota Ngawi. Kantor Pelayanan Pajak Pratama ini berdiri sejak tahun 2007 yang terletak di Kota Ngawi, Jl. Ahmad Yani No.2 Klitik, Geneng, Ngawi Jawa Timur. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi ini pada

intinya sama dengan keberadaanya dengan Kantor Pelayanan Pajak lainnya di seluruh Indonesia.

2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Kota Ngawi

a. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Ngawi Menjadi kantor pelayanan pajak modern yang efektif, efisien, dan di percaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

b. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Ngawi. Menjaga Citra Direktorat Jenderal Pajak untuk senantiasa mengamankan target penerimaan pajak.

Deskripsi Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data kuantitatif yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Ngawi, data yang diperoleh dari KKP Pratama Kota Ngawi tahun 2015 dan 2016.

Tabel 4.1

Rekapitulasi Penerimaan Pajak Penghasilan Final atas sektor UMKM pada KKP Pratama Kota Ngawi.

Th.	Target	Realisasi
2015		
Januari	Rp 350.255.700,00	Rp 318.457.237, 00
Februari	Rp 42.590.235,00	Rp 30.572.926,0 0
Maret	Rp 47.700.590,00	Rp 38.695.499,0 0
April	Rp 45.870.900,00	Rp 36.868.190,0 0
Mei	Rp 40.655.870,00	Rp 35.778.685,0 0

Lanjutan tabel 4.1

**Rekapitulasi Penerimaan Pajak
 Penghasilan final atas sektor UMKM
 pada KPP Pratama Kota Ngawi
 Tahun 2015**

Juni	Rp 95.780.500,00	Rp 50.235.099,0 0
Juli	Rp 42.560.780,00	Rp 30.919.655,0 0
Agust us	Rp 86.900.250,00	Rp 76.555.069,0 0
Septe mber	Rp 160.500.980,00	Rp 135.948.690, 00
Oktob er	Rp 95.800.506,00	Rp 87.298.267,0 0
Nove mber	Rp 88.400.750,00	Rp 77.300.780,0 0
Desem ber	Rp 205.800.789,00	Rp 157.754.743, 00

Sumber KPP Pratama Kota Ngawi tahun 2015

Tabel 4.2

**Rekapitulasi Penerimaan Pajak Penghasilan final atas sektor UMKM pada KPP
 Ngawi**

Tahun 2016

Th.	Target	Realisasi
2015		
Januari	Rp	Rp

	360.950.75 0,00	340.533.004, 00
Februari	Rp 35.780.655 ,00	Rp 31.933.540,0 0
Maret	Rp 42.855.960 ,00	Rp 39.241.159,0 0
April	Rp 47.990.878 ,00	Rp 40.558.674,0 0
Mei	Rp 40.569.960 ,00	Rp 37.823.776,0 0
Juni	Rp 85.489.854 ,00	Rp 51.672.546,0 0
Juli	Rp 36.750.780 ,00	Rp 32.609.613,0 0
Agustus	Rp 98.566.430 ,00	Rp 81.051.384,0 0
September	Rp 155.220.89 0,00	Rp 145.148.207, 00
Oktober	Rp 112.410.99 0,00	Rp 91.283.067,0 0
November	Rp 98.500.882 ,00	Rp 81.069.233,0 0

Desember	Rp 190.835.95 0,00	Rp 170.572.902, 00
-----------------	--------------------------	--------------------------

Sumber KPP Pratama Kota Ngawi tahun 2016

Analisis Data

1. Analisis Perkembangan

Berikut perhitungan prosentase atas Perkembangan Penerimaan Pajak Penghasilan Final pada KPP Pratama Ngawi dengan realisasi perbulan pada tahun 2015 dan 2016 pada tabel dibawah ini. Hasil penelitian yang diperoleh dari kantor pelayanan pajak pratama kota Ngawi yaitu berupa data berikut

Tabel 4.3
Perkembangan Penerimaan Pajak Penghasilan Final pada KPP Pratama Kota Ngawi Tahun 2015

Bulan	Realisasi	Perkembangan
Januari	Rp 318.457.23 7,00	-
Februari	Rp 30.572.926 ,00	-90.40%
Maret	Rp 38.695.499 ,00	26.57%
April	Rp 36.868.190 ,00	-4.72%
Mei	Rp 35.778.685 ,00	-2.96%
Juni	Rp 50.235.099 ,00	40.41%

Juli	Rp 30.919.655 ,00	-38,45%
Agustus	Rp 76.555.069 ,00	147,59%
September	Rp 135.948,69 0,00	77,58%
Oktober	Rp 87.298.267 ,00	-35,79%
November	Rp 77.300.780 ,00	-11,45%
Desember	Rp 157.754.74 3,00	104,08%

Data telah diolah oleh penulis

Dari Tabel 4.3 diatas diperoleh perkembangan sangat baik terjadi pada bulan Agustus sebesar 147,59% dan terjadi penurunan pada bulan Februari sebesar (90,40%).

Tabel 4.4
Perkembangan Penerimaan Pajak Penghasilan Final pada KPP Pratama Kota Ngawi Tahun 2016

Bulan	Realisasi	Perkem bangan
Januari	Rp 340.533.004,00	-
Februari	Rp 31.933.540,00	-90.62%
Maret	Rp 39.241.159,00	22.88%
April	Rp	3.36%

	40.558.674,00	
Mei	Rp 37.823.776,00	-6.74%
Juni	Rp 51.672.546. ,00	36.61%
Juli	Rp 32.609.613,00	-36.89%
Agustus	Rp 81.051.384,00	148.55%
September	Rp 145.148.207,00	79.08%
Oktober	Rp 91.283.067,00	-37.11%
November	Rp 81.069.233,00	-11.19%
Desember	Rp 170.572.902,00	110.40%

Data telah diolah oleh penulis

Dari Tabel 4.4 diatas diperoleh perkembangan sangat baik terjadi pada bulan Agustus sebesar 148,55% dan terjadi penurunan pada bulan Februari sebesar (90,62) %.

2. Analisis Efektifitas

Hasil penelitian yang diperoleh dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Ngawi yaitu berupa data sebagai berikut :

Tabel 4.5

**Target, Realisasi dan efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Final dari sektor
 UMKM pada KPP Pratama Kota Ngawi(atas industri olahan kayu)**

Tahun 2015

Bln	Targ et	Realis asi	Efekt vitas	Keteran gan
Janu ari	Rp 350.2	Rp 318.45	90,92 %	Sangat Tinggi

	55.70 0,00	7.237, 00		
Februari	Rp 42.59 0.235 ,00	Rp 30.572 .926,0 0	71,78 %	Tinggi
Maret	Rp 47.70 0.590 ,00	Rp 38.695 .499,0 0	81,12 %	Tinggi
April	Rp 45.87 0.900 ,00	Rp 36.868 .190,0 0	80,37 %	Tinggi
Mei	Rp 40.65 5.870 ,00	Rp 35.778 .685,0 0	88,00 %	Tinggi
Juni	Rp 95.78 0.500 ,00	Rp 50.235 .099,0 0	52,44 %	Rendah
Juli	Rp 42.56 0.780 ,00	Rp 30.919 .655,0 0	72,44 %	Sedang
Agustus	Rp 86.90 0.250 ,00	Rp 76.555 .069,0 0	88,09 %	Tinggi
September	Rp 160.5	Rp 135,94	84,70 %	Tinggi

er	00.98 0,00	8,690, 00		
Okto ber	Rp 95.80 0.506 ,00	Rp 87.298 .267,0 0	91,12 %	Sangat Tinggi
Nov emb er	Rp 88.40 0.750 ,00	Rp 77.300 .780,0 0	87,44 %	Tinggi
Dese mber	Rp 205.8 00.78 9,00	Rp 157.75 4.743, 00	76,65 %	Tinggi
Rata -rata	Rp1.3 02.78 7.850 ,00	Rp1.0 76.384 .840,0 0	82,62 %	Tinggi

Sumber : KPP Pratama Ngawi tahun 2015
 (Data telah diolah oleh penulis)

Perhitungan Efektivitas berdasar tabel 4.5 target dilakukan dengan cara membandingkan realisasi pemungutan Pajak Penghasilan Final dengan anggaran pemungutan Pajak Penghasilan Final di KPP Ngawi efektivitas yang terjadi pada tahun 2015 cukup efektif dan termasuk kategori naik, walaupun belum mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun efektivitas, target dan realisasi pada Penerimaan Pajak atas sektor UMKM di KPP Pratama Ngawi adalah efektivitas tertinggi pada bulan Januari 91,92% dan efektivitas terendah terjadi pada bulan Juni 52,44%.

Tabel 4.6

**Target, Realisasi dan efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Final dari sektor
 UMKM pada KPP Pratama Kota Ngawi
 (atas industri olahan kayu) Tahun 2016**

Bln	Target	Realis asi	Efeksi fitas	Ketera ngan
Jan	Rp	Rp 340.	94,34	Sangat

uari	360.95 0.750,0 0		%	Tinggi
Feb ruar i	Rp 35.780. 655,00	Rp 31.933 .540,0 0	89,24 %	Tinggi
Mar et	Rp 42.855. 960,00	Rp 39.241 .159,0 0	92,64 %	Sangat Tinggi
Apr il	Rp 47.990. 878,00	Rp 40.558 .674,0 0	84,51 %	Tinggi
Mei	Rp 40.569. 960,00	Rp 37.823 .776,0 0	93,25 %	Sangat Tinggi
Juni	Rp 85.489. 854,00	Rp 51.672 .546,0 0	60,50 %	Renda h
Juli	Rp 36.750. 780,00	Rp 32.609 .613,0 0	89,46 %	Tinggi
Agu stus	Rp 98.566. 430,00	Rp 81.051 .384,0 0	82,22 %	Tinggi
Sep	Rp	Rp	93,51	Sangat

tem ber	155.22 0.890,0 0	145.14 8.207, 00	%	Tinggi
Okt obe r	Rp 112.41 0.990,0 0	Rp 91.283 .067,0 0	81,13 %	Tinggi
Nov emb er	Rp 98.500. 882,00	Rp 81.069 .233,0 0	82,30 %	Tinggi
Des emb er	Rp 190.83 5.950,0 0	Rp 170.57 2.902, 00	89,66 %	Tinggi
Rat a- rata	Rp1.30 5.923.9 79,00	Rp1.1 43.497 .105,0 0	87,56 %	Tinggi

*Sumber : KPP Pratama Ngawi tahun 2016
 (Data telah diolah oleh penulis)*

Perhitungan Efektivitas berdasarkan tabel 4.6 target dilakukan dengan cara membandingkan realisasi pemungutan Pajak Penghasilan Final dengan anggaran pemungutan Pajak Penghasilan Final di KPP Pratama Ngawi, efektivitas yang terjadi tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 cukup efektif dan termasuk kategori baik dan naik walaupun belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun efektivitas atas target dan realisasi pada Penerimaan Pajak atas sektor UMKM di KPP Pratama Ngawi adalah efektivitas tertinggi pada bulan Januari 94,34% dan efektivitas terendah terjadi pada bulan Juni 60,50 %.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan oleh penulis di Kantor Pelayanan Pajak Kota Ngawi. Terdapat beberapa pembahasan atas penelitian, sebagai berikut :

1. Perkembangan penerimaan pajak atas sektor UMKM pada KPP Pratama Kota Ngawi pada tahun 2015 sangat baik terjadi pada bulan Juli sebesar 147,59% dan terjadi penurunan pada bulan Februari sebesar (90,40%).

Sedangkan pada 2016 diperoleh perkembangan sangat baik terjadi pada bulan Juli sebesar 148,55% dan terjadi penurunan pada bulan sebesar (90,62) %.

2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Final dari sektor UMKM pada KPP Ngawi (atas industri olahan kayu) Tahun 2015 yaitu dengan perhitungan efektivitas pada penerimaan pajak penghasilan final atas sektor UMKM pada KPP Pratama Kota Ngawi. Untuk target pada penerimaan pajak penghasilan Final di sektor UMKM dilakukan dengan cara membandingkan realisasi pemungutan pajak penghasilan final dengan anggaran pemungutan Pajak Penghasilan Final di KPP Ngawi. Adapun efektivitas atas target dan realisasi pada penerimaan pajak atas sektor UMKM di KPP Pratama Ngawi di Tahun 2015 yaitu efektivitas tertinggi pada bulan Oktober 91,12%. dan efektivitas terendah terjadi pada bulan Juni 52,44%. Sedangkan

target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan final dari sektor UMKM pada KPP Ngawi (atas industri olahan kayu) tahun 2016

dengan perhitungan efektivitas berdasarkan target dilakukan dengan cara membandingkan realisasi pemungutan pajak penghasilan final dengan anggaran pemungutan pajak penghasilan final di KPP Pratama Ngawi pertumbuhan tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 cukup efektif dan termasuk kategori baik dan naik walaupun belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Efektifitas atas target dan realisasi pada penerimaan pajak atas sektor UMKM di KPP Pratama Ngawi tahun 2016 adalah efektivitas tertinggi pada bulan Januari 94,34% dan efektivitas terendah terjadi pada bulan Juni 60,50 %.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian KPP Pratama Ngawi di atas dapat diketahui bahwa :

1. Perkembangan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) pada Penerimaan Pajak di KPP Pratama Ngawi atas sektor UMKM Pada tahun 2015 (untuk industri olahan kayu) mengalami perkembangan yang sangat baik pada bulan Juli yaitu sebesar 147,59% dan mengalami

- perkembangan yang kurang baik atau rendah di bulan Januari (90,40) %. Sedangkan perkembangan yang terjadi pada 2016 mengalami perkembangan yang sangat baik pada bulan Juli sebesar 148,55% dan mengalami perkembangan yang kurang baik atau rendah pada bulan Januari (90,62)%.
2. Efektifitas Pada Penerimaan Pajak Penghasilan atas sektor UMKM pada KPP Ngawi tertinggi pada 2015 terjadi pada bulan Oktober 91,12% dan efektivitas terendah terjadi pada bulan Juni 52,44%. Sedangkan pada tahun 2016 efektivitas tertinggi pada bulan Januari 94,34% dan efektivitas terendah terjadi pada bulan Juni 60,50%.
 3. Hambatan yang dialami oleh pihak KPP Pratama Ngawi dalam penerimaan pajak pada sektor UMKM pada industri olahan kayu Tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak masih sangat kurang dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar kewajibannya yaitu membayar pajak tepat waktu dan kurang mengertinya masyarakat akan manfaat pajak itu sendiri .
 4. Upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi, atas penerimaan pajak penghasilan final di sektor UMKM pada industri olahan kayu.
 - a. Dengan meningkatkan profesionalisme petugas, dengan lebih giat dan ramah dalam melaksanakan dalam melayani wajib pajak. Supaya wajib pajak merasa nyaman dalam melaporkan pajaknya.
 - b. Dengan meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi kepada wajib pajak dengan cara mendatangi instansi terkait dengan wajib pajak yang memiliki badan usaha.

Saran

Adapun saran sebagai alternatif pemecahan masalah yaitu

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi sebaiknya menerbitkan surat tagihan kepada wajib pajak yang memiliki tanggungan atas usaha yang dilakukan pada saat wajib pajak belum melakukan pembayaran pajak pada setiap penerimaan penghasilan kena pajak.
2. Kantor Pelayan Pajak Pratama Ngawi alangkah baiknya selalu dan lebih rutin dalam setiap mendata wajib pajak yang memiliki usaha serta mendata wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak, serta memberikan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang nakal seperti tidak melaporkan semua hasil yang diterima atas usaha yang dilakukan.

